https://journaledutech.com/index.php/great
Global Research and Innovation Journal (GREAT)
Volume 2, Nomor 3, 2026, Hal. 928-938
ISSN : 3090-3289

KESENJANGAN ANTARA SAK EMKM DAN PRAKTIK PENCATATAN KEUANGAN UMKM DI INDONESIA

Nadila Elsa Sahid[1], Izan Muhammad Syauqie[2], Naila Zaskia[3], Kus Tri Andyarini[4]
Akuntansi, Universitas Kebangsaan Indonesia
Email: *nadilaelsas@gmail.com[1], izansyauqii@gmail.com[2], nailazaskiachaniago@gmail.com[3], kus_tri_andyarini@stei.ac.id[4]

ABSTRAK

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Namun, dalam menjalankan kegiatan usahanya, masih terdapat UMKM yang belum melakukan pencatatan keuangan secara teratur dan sesuai dengan standar akuntansi. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) disusun untuk membantu entitas yang memenuhi kriteria dalam menyusun laporan keuangan secara lebih sederhana dan terstruktur. Meskipun demikian, penerapan standar tersebut dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala. Artikel ini bertujuan untuk membahas kesenjangan antara ketentuan SAK EMKM dan praktik pencatatan keuangan UMKM, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kesenjangan tersebut, serta menjelaskan dampaknya terhadap pengelolaan dan pengembangan usaha. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pembahasan didasarkan pada materi presentasi mengenai kesenjangan SAK EMKM dan praktik UMKM, informasi resmi Ikatan Akuntan Indonesia, serta penelitian terdahulu pada UMKM di Indonesia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kendala penerapan SAK EMKM berkaitan dengan keterbatasan pemahaman akuntansi, pencatatan yang masih sederhana, pencampuran keuangan pribadi dan usaha, serta kurangnya tenaga khusus yang menangani pencatatan keuangan. Oleh karena itu, diperlukan pencatatan transaksi yang konsisten, pemisahan keuangan pribadi dan usaha, penggunaan alat pencatatan yang sesuai, serta pelatihan dan pendampingan berkelanjutan agar penerapan SAK EMKM dapat mendukung pengelolaan keuangan UMKM secara lebih baik.

Kata kunci **SAK EMKM, UMKM, Pencatatan Keuangan, Laporan Keuangan, Praktik Akuntansi**

ABSTRACT

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play an important role in Indonesia's economy. However, in conducting their business activities, some MSMEs still do not maintain regular financial records in accordance with accounting standards. The Financial Accounting Standards for Micro, Small, and Medium Entities (SAK EMKM) were developed to help eligible entities prepare financial statements in a simpler and more structured manner. Nevertheless, the implementation of these standards in practice still faces various challenges. This article aims to discuss the gap between the requirements of SAK EMKM and the financial recording practices of MSMEs, identify the factors influencing this gap, and explain its impact on business management and development. The method used is a literature review with a descriptive qualitative approach. The discussion is based on presentation materials concerning the gap between SAK EMKM and MSME practices, official information from the Indonesian Institute of Accountants, and previous studies on MSMEs in Indonesia. Several studies

indicate that the challenges in implementing SAK EMKM are related to limited accounting knowledge, the use of basic financial recording methods, the mixing of personal and business finances, and the lack of dedicated personnel responsible for financial recordkeeping. Therefore, consistent transaction recording, the separation of personal and business finances, the use of appropriate bookkeeping tools, and continuous training and assistance are necessary to ensure that the implementation of SAK EMKM can support better financial management among MSMEs.

Keywords ***SAK EMKM, MSMEs, Financial Recording, Financial Statements, Accounting Practices.***

1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu bagian penting dalam kegiatan perekonomian Indonesia. UMKM menjalankan berbagai jenis kegiatan usaha, mulai dari perdagangan, kuliner, jasa, industri rumahan, hingga usaha kreatif. Keberadaan UMKM memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menjalankan kegiatan ekonomi dan memperoleh penghasilan. Agar dapat bertahan dan berkembang, pelaku UMKM tidak hanya perlu memperhatikan penjualan dan kegiatan operasional, tetapi juga perlu mengelola keuangan usahanya dengan baik.

Pengelolaan keuangan merupakan salah satu aspek penting dalam keberlangsungan usaha. Melalui pencatatan keuangan, pemilik usaha dapat mengetahui jumlah pendapatan, beban, aset, kewajiban, dan modal yang dimiliki. Informasi tersebut dapat digunakan untuk menilai apakah usaha memperoleh keuntungan atau mengalami kerugian, mengendalikan pengeluaran, serta menentukan langkah yang perlu dilakukan untuk mengembangkan usaha. Sebaliknya, pencatatan yang tidak teratur dapat menyebabkan pemilik usaha kesulitan mengetahui kondisi keuangan yang sebenarnya.

Dalam praktiknya, sebagian pelaku UMKM masih melakukan pencatatan secara sederhana. Pencatatan dapat terbatas pada jumlah penjualan harian dan uang yang keluar untuk membeli barang atau membayar kebutuhan operasional. Bahkan, terdapat pelaku usaha yang hanya mengandalkan ingatan untuk mengetahui pemasukan dan pengeluaran. Cara tersebut mungkin dianggap cukup ketika transaksi masih sedikit, tetapi dapat menimbulkan masalah ketika jumlah transaksi meningkat dan kegiatan usaha menjadi lebih kompleks.

Permasalahan lainnya adalah pencampuran antara keuangan pribadi dan keuangan usaha. Sebagai contoh, uang hasil penjualan digunakan untuk membayar kebutuhan rumah tangga tanpa dicatat sebagai pengambilan pemilik. Sebaliknya, pemilik juga dapat menggunakan uang pribadi untuk membayar kebutuhan usaha tanpa mendokumentasikan transaksi tersebut. Kondisi ini menyebabkan arus uang usaha sulit ditelusuri dan keuntungan yang diperoleh tidak dapat dihitung secara akurat.

SAK EMKM merupakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan entitas yang memenuhi kriteria EMKM. Standar ini memberikan pedoman yang relatif sederhana agar pelaku usaha dapat menyusun laporan keuangan dengan lebih terstruktur. Penggunaan standar tersebut diharapkan membantu pelaku usaha menghasilkan informasi keuangan yang lebih jelas dan berguna untuk menilai kondisi usaha.

Tujuan penerapan SAK EMKM bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan administrasi, melainkan juga untuk membantu pemilik usaha memahami kondisi

keuangan secara lebih tepat. Dengan pencatatan yang teratur, pemilik dapat membedakan pendapatan dari modal atau pinjaman, mengidentifikasi beban usaha, serta mengetahui aset dan kewajiban yang dimiliki. Informasi tersebut menjadi dasar untuk mengevaluasi kinerja dan merencanakan kegiatan usaha berikutnya.

Secara umum, laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM mencakup laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan posisi keuangan menyajikan informasi mengenai aset, liabilitas, dan ekuitas pada suatu tanggal tertentu. Laporan laba rugi menyajikan pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Sementara itu, catatan atas laporan keuangan memberikan informasi tambahan yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan, termasuk kebijakan akuntansi yang relevan.

Penyusunan laporan tersebut memerlukan pencatatan transaksi yang memadai. Pemilik usaha perlu mengidentifikasi transaksi, menyimpan bukti pendukung, mengelompokkan transaksi secara tepat, dan merangkum informasi keuangan pada akhir periode. Dengan demikian, penerapan SAK EMKM tidak cukup hanya dengan membuat buku kas, tetapi juga membutuhkan proses pencatatan dan penyusunan laporan yang sesuai dengan ketentuan standar.

Untuk membantu mengatasi permasalahan tersebut, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengembangkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah atau SAK EMKM. Standar ini dirancang untuk menyediakan kerangka pelaporan keuangan yang lebih sederhana bagi entitas yang memenuhi kriteria EMKM. SAK EMKM berlaku efektif sejak 1 Januari 2018 dan menggunakan dasar pengukuran biaya historis. Standar ini juga menekankan konsep entitas bisnis, yaitu pemisahan antara transaksi dan sumber daya milik usaha dengan kepentingan pribadi pemilik (Ikatan Akuntan Indonesia, n.d.).

Meskipun SAK EMKM telah menyediakan pedoman yang lebih sederhana, keberadaan standar tersebut tidak secara otomatis membuat seluruh UMKM menerapkannya. Pelaku usaha masih dapat menghadapi keterbatasan pengetahuan akuntansi, waktu, sumber daya manusia, dan akses terhadap pelatihan. Selain itu, sebagian pemilik usaha mungkin menganggap pencatatan keuangan sebagai kegiatan administratif yang tidak terlalu penting dibandingkan kegiatan penjualan dan pelayanan pelanggan.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa permasalahan tersebut terjadi pada beberapa UMKM di Indonesia. Syah, Irmawati, dan Alacoque (2023), misalnya, menemukan bahwa UMKM Ligastore Makassar belum menerapkan SAK EMKM dan masih menjadikan laporan penjualan sebagai laporan keuangan. Sajid dan Nindiasari (2024) juga menemukan bahwa pencatatan pada Star Laundry di Yogyakarta masih sederhana dan belum sesuai dengan SAK EMKM. Sementara itu, penelitian pada Butik Roem Store menunjukkan bahwa penerapan SAK EMKM dapat membantu meningkatkan keteraturan dan transparansi laporan keuangan (Hositania, Lukita, & Arimurti, 2024).

Kesenjangan atau gap antara standar dan praktik merupakan perbedaan antara ketentuan yang seharusnya diterapkan dengan kegiatan yang benar-benar dilakukan di lapangan. Dalam konteks SAK EMKM, kesenjangan dapat muncul ketika transaksi tidak dicatat secara konsisten, keuangan pribadi dan usaha bercampur, bukti transaksi tidak disimpan, atau laporan keuangan tidak disusun secara lengkap.

Kesenjangan tersebut tidak selalu berarti bahwa pemilik usaha tidak ingin menerapkan akuntansi. Permasalahan dapat timbul karena pelaku usaha belum memahami manfaat standar, tidak memiliki waktu untuk mencatat transaksi, atau belum memperoleh pendampingan yang sesuai. Dengan demikian, upaya mengurangi kesenjangan perlu mempertimbangkan ketentuan standar sekaligus kondisi yang dihadapi pelaku UMKM.

Berdasarkan kondisi tersebut, artikel ini membahas kesenjangan antara SAK EMKM dan praktik pencatatan keuangan UMKM di Indonesia. Pembahasan meliputi tujuan SAK EMKM, bentuk kesenjangan yang terjadi, faktor penyebab, dampak terhadap pengelolaan usaha, contoh penerapan pada UMKM, serta upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pencatatan dan pelaporan keuangan.

2. METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode tersebut dipilih karena pembahasan bertujuan menjelaskan kesenjangan antara SAK EMKM dan praktik pencatatan keuangan UMKM berdasarkan materi dan penelitian yang telah tersedia, bukan mengumpulkan data primer melalui survei atau wawancara langsung.

Sumber utama pembahasan berasal dari materi presentasi kelompok berjudul "GAP SAK EMKM vs Praktik UMKM". Materi tersebut digunakan untuk mengidentifikasi pokok permasalahan, meliputi kelemahan pencatatan keuangan, dampaknya terhadap pengelolaan usaha, manfaat penerapan SAK EMKM, dan solusi yang dapat dilakukan oleh pelaku UMKM. Informasi tersebut kemudian dilengkapi dengan informasi resmi dari Ikatan Akuntan Indonesia dan artikel jurnal yang membahas penerapan SAK EMKM pada UMKM di Indonesia.

Penelitian terdahulu dipilih berdasarkan relevansinya dengan topik, terutama penelitian yang menjelaskan kondisi pencatatan keuangan UMKM, kendala penerapan SAK EMKM, serta perubahan yang dapat terjadi setelah standar diterapkan. Contoh penelitian yang dibahas meliputi UMKM Ligastore Makassar, Star Laundry di Yogyakarta, Butik Roem Store, UMKM di Kota Lhokseumawe, serta Toko Ide Elektronik di Surabaya.

Analisis dilakukan dengan mengelompokkan informasi ke dalam beberapa tema, yaitu bentuk kesenjangan antara standar dan praktik, faktor penyebab, dampak terhadap pengelolaan usaha, hasil penelitian terdahulu, dan upaya perbaikan. Temuan dari berbagai sumber kemudian dibandingkan untuk memperoleh gambaran mengenai permasalahan yang berulang dan solusi yang dapat dipertimbangkan.

Artikel ini memiliki keterbatasan karena menggunakan sumber literatur terpilih dan tidak melakukan pengumpulan data lapangan secara langsung. Oleh sebab itu, pembahasan ini tidak dimaksudkan untuk mengukur tingkat penerapan SAK EMKM pada seluruh UMKM di Indonesia. Contoh yang digunakan menggambarkan kondisi pada usaha atau kelompok responden yang diteliti dalam masing-masing penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Bentuk Kesenjangan antara SAK EMKM dan Praktik UMKM

Kesenjangan antara SAK EMKM dan praktik UMKM dapat dilihat dari beberapa kelemahan pencatatan keuangan yang sering menjadi perhatian. Salah satunya adalah pencatatan transaksi yang tidak konsisten. Dalam kegiatan sehari-hari, pemilik usaha dapat lebih memprioritaskan penjualan dan pelayanan pelanggan daripada pencatatan. Akibatnya, transaksi tidak selalu dicatat pada saat terjadi dan beberapa informasi berisiko terlupakan.

Pencatatan yang tidak konsisten dapat menimbulkan perbedaan antara jumlah uang yang sebenarnya diterima atau dibayarkan dengan jumlah yang tercatat. Apabila transaksi tidak segera didokumentasikan, pemilik juga dapat mengalami kesulitan mengingat tujuan pembayaran atau pihak yang melakukan transaksi. Kondisi ini membuat proses pemeriksaan dan penyusunan laporan keuangan menjadi lebih sulit.

Bentuk kesenjangan berikutnya adalah pencampuran keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Dalam UMKM yang dikelola langsung oleh pemilik, uang hasil penjualan sering kali dianggap sebagai uang yang dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan. Ketika uang usaha digunakan untuk kebutuhan pribadi tanpa pencatatan yang tepat, keuntungan usaha sulit ditentukan. Pemilik juga dapat mengalami kesulitan mengetahui jumlah modal yang masih tertanam dalam usaha.

Kelemahan lainnya adalah tidak tersedianya bukti transaksi yang memadai. Nota pembelian, faktur penjualan, bukti pembayaran, dan dokumen pendukung lainnya memiliki fungsi penting untuk membuktikan bahwa transaksi benar-benar terjadi. Jika dokumen tersebut tidak disimpan, pemilik akan kesulitan menelusuri transaksi ketika terjadi selisih atau kesalahan pencatatan.

Selain itu, sebagian UMKM belum menyusun laporan keuangan secara lengkap. Pencatatan yang hanya berisi penjualan dan pengeluaran kas belum tentu dapat menjelaskan seluruh aset, kewajiban, dan modal usaha. Pemilik mungkin mengetahui jumlah uang yang tersedia, tetapi belum mengetahui nilai persediaan, piutang pelanggan, utang kepada pemasok, atau nilai aset tetap yang digunakan dalam kegiatan usaha.

Kesenjangan juga dapat muncul karena transaksi tidak dikelompokkan dengan benar. Misalnya, tambahan modal pemilik dapat dicatat sebagai pendapatan, sedangkan pembelian peralatan usaha dicatat seluruhnya sebagai beban tanpa mempertimbangkan karakteristik transaksi. Kesalahan klasifikasi dapat memengaruhi perhitungan laba rugi dan penyajian posisi keuangan. Oleh karena itu, penerapan SAK EMKM memerlukan pencatatan yang teratur serta pemahaman dasar mengenai pengakuan dan pengelompokan transaksi.

3.2 Faktor Penyebab Kesenjangan Penerapan SAK EMKM

Salah satu faktor yang dapat menyebabkan kesenjangan adalah keterbatasan pemahaman akuntansi. Pelaku usaha yang belum pernah memperoleh pelatihan akuntansi mungkin belum memahami cara membedakan aset, kewajiban, modal, pendapatan, dan beban. Mereka dapat mengetahui jumlah uang yang masuk dan keluar, tetapi belum mampu mengolah informasi tersebut menjadi laporan keuangan yang terstruktur.

Faktor berikutnya adalah keterbatasan waktu dan sumber daya manusia. Pada usaha berskala kecil, pemilik sering menjalankan beberapa fungsi sekaligus. Pencatatan keuangan kemudian menjadi tugas tambahan yang dilakukan setelah kegiatan

operasional selesai. Jika tidak ada rutinitas yang jelas, pencatatan berpotensi tertunda atau hanya dilakukan ketika diperlukan.

Kurangnya sosialisasi dan pendampingan praktis juga dapat menjadi kendala. Pemahaman terhadap definisi SAK EMKM belum tentu membuat pemilik langsung mampu menerapkannya pada transaksi sehari-hari. Pelaku usaha membutuhkan contoh yang sesuai dengan jenis usaha mereka, misalnya cara mencatat pembelian persediaan, pembayaran utang, penerimaan piutang, pengambilan pribadi, dan pembelian peralatan.

Kebiasaan lama juga dapat memengaruhi penerapan standar. Pemilik usaha yang telah lama menggunakan catatan sederhana mungkin merasa cara tersebut sudah cukup selama usaha masih berjalan. Padahal, ketika transaksi bertambah, pencatatan informal dapat semakin sulit digunakan untuk mengendalikan biaya dan mengevaluasi keuntungan.

Teknologi dapat membantu pencatatan, tetapi penggunaannya tidak otomatis menjamin laporan keuangan sesuai standar. Spreadsheet dan aplikasi akuntansi dapat memudahkan pengelompokan transaksi, tetapi hasilnya tetap bergantung pada ketepatan data yang dimasukkan. Oleh karena itu, penggunaan teknologi perlu disertai pemahaman dasar akuntansi dan pemeriksaan secara berkala.

3.3 Penelitian Terdahulu tentang Penerapan SAK EMKM

Sejumlah penelitian di Indonesia telah membahas penerapan SAK EMKM pada berbagai jenis UMKM. Penelitian-penelitian tersebut memberikan gambaran bahwa kesenjangan antara standar dan praktik dapat muncul dalam bentuk yang berbeda, bergantung pada kondisi masing-masing usaha.

Syah, Irmawati, dan Alacoque (2023) meneliti penerapan SAK EMKM dalam penyusunan laporan keuangan pada UMKM Ligastore Makassar. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ligastore Makassar belum menerapkan SAK EMKM dalam pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan keuangannya. Pemilik usaha hanya membuat laporan penjualan yang belum memenuhi ketentuan standar. Kendala yang ditemukan meliputi kurangnya pemahaman pemilik mengenai SAK EMKM dan tidak adanya staf khusus yang bertanggung jawab menyusun laporan keuangan. Temuan ini menunjukkan bahwa pencatatan penjualan saja belum cukup untuk menggambarkan kondisi keuangan usaha secara menyeluruh.

Sajid dan Nindiasari (2024) melakukan penelitian pada UMKM Star Laundry di Yogyakarta. Penelitian tersebut menemukan bahwa pencatatan keuangan Star Laundry masih sederhana dan terutama berupa nota transaksi. UMKM tersebut belum menerapkan sistem akuntansi yang sesuai dengan SAK EMKM karena keterbatasan pemahaman mengenai akuntansi dan penyusunan laporan keuangan. Walaupun pencatatan yang dilakukan telah membantu pemilik mengetahui pemasukan dan pengeluaran, bentuk pencatatan tersebut belum menyediakan informasi selengkap laporan keuangan berdasarkan standar. Kasus Star Laundry memperlihatkan bahwa pelaku usaha dapat memiliki kesadaran untuk mencatat transaksi, tetapi tetap memerlukan pengetahuan dan pendampingan agar pencatatannya berkembang menjadi pelaporan yang terstruktur.

Penelitian Hositania, Lukita, dan Arimurti (2024) membahas penerapan SAK EMKM dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan UMKM Butik Roem Store. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa penerapan standar dapat membantu menghasilkan laporan keuangan yang lebih teratur dan transparan. Laporan yang lebih terstruktur juga membantu pemilik memahami kondisi keuangan dan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait perkembangan usaha. Temuan ini melengkapi dua penelitian sebelumnya karena menunjukkan bahwa penerapan SAK EMKM bukan hanya berkaitan dengan pemenuhan standar, tetapi juga dapat meningkatkan kegunaan informasi keuangan untuk pengelolaan bisnis.

Tatik, Mursidah, Rais, dan Ikhyanuddin (2024) meneliti penerapan SAK EMKM pada UMKM di Kota Lhokseumawe. Penelitian tersebut melibatkan 98 UMKM. Hasilnya menunjukkan bahwa 10 UMKM telah menggunakan SAK EMKM, sedangkan 88 UMKM lainnya belum menerapkan standar tersebut. Penelitian ini melaporkan bahwa sebagian pelaku usaha belum mengetahui SAK EMKM dan sebagian lainnya menganggap penerapannya sulit serta memperlama proses penyusunan laporan keuangan. Temuan ini menunjukkan bahwa sosialisasi dan penyederhanaan pendampingan praktis masih diperlukan agar pelaku usaha memahami manfaat standar dan cara menerapkannya.

Penelitian Wawolangi dan Ayu (2025) membahas transparansi laporan keuangan pada Toko Ide Elektronik di Surabaya. Studi tersebut menggambarkan pencatatan yang masih sederhana, pencampuran transaksi pribadi dan usaha, serta belum tersusunnya laporan keuangan secara terstruktur. Penyusunan kembali informasi keuangan dengan mengacu pada SAK EMKM membantu penyajian informasi mengenai persediaan, aset tetap, penyusutan, dan kinerja usaha secara lebih sistematis. Kasus ini memperlihatkan bagaimana penerapan kerangka pelaporan yang terstruktur dapat membantu memperjelas informasi yang sebelumnya belum tersaji secara memadai.

Secara keseluruhan, penelitian terdahulu menunjukkan adanya pola permasalahan yang serupa, yaitu keterbatasan pemahaman akuntansi, pencatatan yang masih sederhana, belum lengkapnya laporan keuangan, dan kurangnya tenaga atau pendampingan. Namun, hasil penelitian tersebut berasal dari objek dan metode penelitian yang berbeda. Oleh sebab itu, temuan pada satu UMKM atau wilayah tidak dapat langsung dianggap mewakili seluruh UMKM di Indonesia.

3.4 Dampak Kelemahan Pencatatan terhadap Pengelolaan Usaha

Kelemahan pencatatan keuangan dapat menyebabkan pemilik usaha kesulitan mengetahui laba atau rugi yang sebenarnya. Jumlah penjualan tidak sama dengan keuntungan karena usaha juga menanggung biaya pembelian barang, beban operasional, dan berbagai pengeluaran lainnya. Jika sebagian pengeluaran tidak dicatat atau transaksi diklasifikasikan secara keliru, hasil usaha yang dihitung dapat berbeda dari kondisi sebenarnya.

Pencatatan yang kurang memadai juga menyulitkan pengendalian biaya. Pemilik usaha mungkin mengetahui bahwa uang kas berkurang, tetapi tidak dapat memastikan apakah penurunan tersebut disebabkan oleh kenaikan biaya bahan baku, pengeluaran operasional, pembelian aset, atau penggunaan uang untuk kepentingan pribadi. Tanpa informasi yang jelas, pemilik akan kesulitan menentukan pengeluaran yang perlu dikendalikan.

Dampak berikutnya adalah meningkatnya risiko kesalahan dalam pengambilan keputusan. Keputusan untuk menambah persediaan, membeli peralatan, merekrut karyawan, atau memperluas usaha sebaiknya didasarkan pada informasi mengenai

kondisi keuangan. Apabila informasi tersebut tidak lengkap, pemilik berisiko mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan kemampuan keuangan usahanya.

Kelemahan pencatatan juga dapat menyulitkan proses pengajuan pembiayaan. Laporan keuangan yang terstruktur dapat membantu lembaga keuangan memahami kondisi usaha dan menilai kemampuan pembayaran calon peminjam. Namun, penyusunan laporan sesuai SAK EMKM tidak menjamin pembiayaan akan disetujui karena lembaga keuangan tetap mempertimbangkan persyaratan lain, seperti kemampuan membayar, riwayat kredit, dan ketentuan pembiayaan yang berlaku.

Selain itu, perkembangan usaha sulit dievaluasi jika pencatatan tidak dilakukan secara konsisten. Peningkatan penjualan belum tentu berarti keuntungan meningkat apabila biaya juga naik lebih besar. Dengan membandingkan informasi keuangan dari beberapa periode, pemilik dapat menilai perubahan pendapatan, beban, aset, dan kewajiban secara lebih jelas.

3.5 Solusi untuk Mengurangi Kesenjangan antara SAK EMKM dan Praktik UMKM

Langkah pertama yang dapat dilakukan adalah memisahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha. Pemilik dapat menggunakan rekening atau tempat penyimpanan uang yang berbeda untuk kegiatan usaha. Setiap pengambilan uang untuk kepentingan pribadi dan tambahan modal dari pemilik juga perlu dicatat secara terpisah. Langkah ini membantu pemilik mengetahui sumber dan penggunaan dana usaha secara lebih jelas.

Langkah berikutnya adalah mencatat transaksi secara rutin. Setiap transaksi sebaiknya dicatat sedekat mungkin dengan waktu terjadinya agar informasi tidak terlupakan. Pencatatan dasar dapat memuat tanggal transaksi, keterangan, jumlah uang, dan jenis transaksi. Pemilik kemudian dapat memeriksa catatan tersebut secara berkala dengan membandingkannya terhadap saldo kas, mutasi rekening, dan bukti transaksi.

Penyimpanan bukti transaksi juga perlu menjadi kebiasaan. Nota, faktur, bukti transfer, dan dokumen pembayaran dapat disimpan dalam bentuk fisik maupun digital. Dokumen sebaiknya dikelompokkan berdasarkan tanggal atau jenis transaksi agar mudah ditemukan kembali ketika dibutuhkan. Bukti tersebut membantu pemilik menelusuri transaksi dan memeriksa apabila terdapat selisih pencatatan.

UMKM juga dapat menggunakan buku kas yang terstruktur, spreadsheet, atau aplikasi akuntansi sederhana. Pemilihan alat perlu disesuaikan dengan jenis transaksi, skala usaha, dan kemampuan pengguna. Teknologi sebaiknya dipandang sebagai alat bantu, bukan pengganti pemahaman akuntansi. Pemilik tetap perlu memastikan bahwa transaksi yang dimasukkan telah dicatat dan dikelompokkan dengan benar.

Selanjutnya, pemilik perlu menyusun laporan keuangan secara berkala berdasarkan informasi yang tersedia. Laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan memiliki fungsi yang saling melengkapi. Jika pemilik mengalami kesulitan dalam menentukan akun atau menyusun laporan, pendampingan dari praktisi akuntansi, perguruan tinggi, organisasi profesi, atau lembaga pembina UMKM dapat dimanfaatkan.

Pelatihan juga sebaiknya dilakukan secara praktis dan berkelanjutan. Materi pelatihan perlu disesuaikan dengan transaksi yang benar-benar dialami oleh UMKM. Sebagai contoh, pemilik usaha dagang dapat mempelajari pencatatan pembelian dan penjualan persediaan, sedangkan usaha jasa dapat berlatih mencatat pendapatan jasa, beban operasional, dan pembelian peralatan. Pendekatan yang menggunakan contoh

nyata akan membantu pelaku usaha memahami hubungan antara transaksi sehari-hari dan laporan keuangan.

3.6 Manfaat Penerapan SAK EMKM bagi UMKM

Penerapan SAK EMKM secara konsisten dapat meningkatkan transparansi keuangan. Informasi mengenai aset, kewajiban, modal, pendapatan, dan beban dapat disajikan dengan lebih terstruktur sehingga pemilik tidak hanya mengandalkan jumlah uang kas untuk menilai keadaan usaha.

Manfaat lainnya adalah meningkatnya akuntabilitas pencatatan. Ketika transaksi didukung bukti dan dicatat secara teratur, pemilik dapat menelusuri asal serta penggunaan dana. Proses pemeriksaan transaksi juga menjadi lebih mudah karena informasi yang diperlukan tersedia dan tersusun dengan baik.

Laporan keuangan yang memadai dapat membantu pemilik mengevaluasi keuntungan, mengendalikan pengeluaran, serta merencanakan kebutuhan usaha. Pemilik dapat membandingkan kinerja antarperiode dan menilai apakah kegiatan operasional telah berjalan sesuai rencana. Informasi tersebut dapat digunakan untuk mempertimbangkan penyesuaian harga, pengendalian biaya, dan penggunaan sumber daya.

Selain untuk kebutuhan internal, laporan keuangan yang terstruktur dapat membantu komunikasi dengan pihak eksternal, seperti lembaga keuangan, pemasok, atau calon mitra usaha. Pihak-pihak tersebut dapat menggunakan informasi keuangan sebagai salah satu bahan penilaian, meskipun keputusan mereka tetap bergantung pada kebutuhan dan persyaratan masing-masing.

Dengan demikian, penerapan SAK EMKM dapat mendukung pengembangan usaha apabila informasi yang dihasilkan akurat, lengkap, dan benar-benar digunakan dalam pengambilan keputusan. Manfaat tersebut tidak hanya bergantung pada penyusunan laporan, tetapi juga pada konsistensi pencatatan dan kemampuan pemilik memahami informasi keuangan yang disajikan.

3.7 Peran Pemerintah, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Terkait

Mengurangi kesenjangan penerapan SAK EMKM bukan hanya tanggung jawab pemilik UMKM. Pemerintah dan lembaga pembina usaha dapat membantu melalui sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan yang mudah diakses. Pelatihan sebaiknya tidak hanya menjelaskan pengertian standar, tetapi juga memberikan latihan mencatat transaksi dan menyusun laporan keuangan berdasarkan contoh yang dekat dengan kegiatan usaha.

Perguruan tinggi dapat berperan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat, program pendampingan UMKM, dan praktik mahasiswa di bidang akuntansi. Kegiatan tersebut dapat membantu pelaku usaha mengidentifikasi kebutuhan pencatatan dan mengembangkan sistem yang sesuai dengan skala usaha. Di sisi lain, mahasiswa dapat memperoleh pengalaman menerapkan pengetahuan akuntansi pada kondisi nyata.

Organisasi profesi akuntansi juga dapat mendukung penyebaran informasi melalui panduan dan materi pembelajaran yang mudah dipahami. Materi tersebut dapat membantu pelaku usaha memahami konsep dasar SAK EMKM serta menghindari kesalahan umum dalam pencatatan transaksi.

Penyedia teknologi dapat berkontribusi dengan mengembangkan aplikasi yang mudah digunakan dan sesuai dengan kebutuhan UMKM. Namun, penggunaan aplikasi

tetap perlu disertai pemahaman mengenai data yang dimasukkan dan cara membaca hasil laporan. Kerja sama antara pemilik usaha, pemerintah, perguruan tinggi, organisasi profesi, dan penyedia teknologi dapat membantu membangun kebiasaan pencatatan yang lebih konsisten.

4. KESIMPULAN

SAK EMKM merupakan standar yang dirancang untuk membantu entitas mikro, kecil, dan menengah yang memenuhi kriteria dalam menyusun laporan keuangan secara lebih sederhana dan terstruktur. Penerapan standar ini dapat membantu pemilik usaha memahami kondisi keuangan, mengevaluasi kinerja, mengendalikan biaya, dan merencanakan pengembangan usaha. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat kesenjangan antara ketentuan SAK EMKM dan pencatatan keuangan yang dilakukan oleh sebagian UMKM.

Kesenjangan tersebut dapat terlihat dari pencatatan transaksi yang tidak konsisten, pencampuran keuangan pribadi dan usaha, kurangnya bukti transaksi, kesalahan pengelompokan transaksi, serta laporan keuangan yang belum lengkap. Faktor yang dapat memengaruhi kondisi tersebut antara lain keterbatasan pemahaman akuntansi, kurangnya waktu dan sumber daya manusia, kebiasaan pencatatan sederhana, serta terbatasnya sosialisasi dan pendampingan.

Penelitian terdahulu pada UMKM Ligastore Makassar, Star Laundry di Yogyakarta, Butik Roem Store, UMKM di Kota Lhokseumawe, dan Toko Ide Elektronik di Surabaya menunjukkan bahwa penerapan SAK EMKM menghadapi tantangan yang berbeda pada masing-masing objek penelitian. Beberapa penelitian menggambarkan keterbatasan pencatatan dan pemahaman standar, sedangkan penelitian lainnya menunjukkan bahwa penyusunan laporan yang lebih terstruktur dapat membantu meningkatkan transparansi dan pemahaman pemilik terhadap kondisi usaha.

Oleh karena itu, pengurangan kesenjangan memerlukan upaya yang berkelanjutan. Pencatatan transaksi secara rutin, pemisahan keuangan pribadi dan usaha, penyimpanan bukti transaksi, penggunaan alat pencatatan yang sesuai, serta pelatihan dan pendampingan dapat membantu meningkatkan kualitas informasi keuangan UMKM. Kesimpulan artikel ini terbatas pada materi dan literatur yang ditinjau sehingga tidak dimaksudkan untuk menggambarkan tingkat penerapan SAK EMKM pada seluruh UMKM di Indonesia.

5. DAFTAR PUSTAKA

Ar'razi, M. F., Arief, K., & Sudjana. (2023). Implementasi SAK EMKM dalam penyusunan laporan keuangan: Studi kasus pada UMKM Pisang Mesir Indonesia. Indonesian Accounting Literacy Journal, 3(2), 144–155. https://doi.org/10.35313/ialj.v3i2.3178

Ayem, S., Putri, F. K., Arang, D. F., Cholifiana, F., Langu, H. R. L. K. R., Putri, T. P., & Septiani, V. (2024). Systematic literature review: Implementasi SAK EMKM pada penyusunan laporan keuangan UMKM di Indonesia. Jurnal Literasi Akuntansi, 4(2), 87–99. https://doi.org/10.55587/jla.v4i2.118

Hositania, H., Lukita, C., & Arimurti, T. (2024). Penerapan SAK EMKM dalam kualitas laporan keuangan UMKM (Studi kasus pada UMKM Butik Roem Store). Journal of Economic, Business and Accounting (COSTING), 7(5). https://doi.org/10.31539/costing.v7i5.12079

Ikatan Akuntan Indonesia. (n.d.). Tentang SAK EMKM. https://web.iaiglobal.or.id/SAK-IAI/Tentang%20SAK%20EMKM

Syah, S. R., Irmawati, I., & Alacoque, M. (2023). Analisis penerapan SAK-EMKM dalam penyusunan laporan keuangan (Studi kasus pada UMKM Ligastore Makassar). Journal of Accounting, Economics, and Business Education, 1(2), 61–70. https://doi.org/10.62794/jaebe.v1i2.97

Tatik, S., Mursidah, M., Rais, R. G. P., & Ikhyanuddin. (2024). Analisis penerapan akuntansi SAK EMKM dalam penyusunan laporan keuangan UMKM (Studi kasus UMKM Kota Lhokseumawe). Jurnal Akuntansi Malikussaleh, 3(1), 135–144. https://doi.org/10.29103/jam.v3i1.14398

Wawolangi, J. A., & Ayu, S. (2025). Measuring the transparency of MSME financial reports: Evaluation of SAK EMKM implementation at Toko Ide Elektronik in Surabaya. CONTABILITA: Journal of Accounting and Finance, 1(2). https://doi.org/10.37477/caf.v1i2.852